

SKRIPSI
PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA TAWURAN OLEH ANAK PADA
TINGKAT PENYIDIKAN DI WILAYAH HUKUM POLSEK PAUH
KOTA PADANG

*Diajukan untuk memenuhi persyaratan dalam rangka
memperoleh gelar Sarjana Hukum*

Oleh :



MUHAMMAD IKHSAN
2010113086

PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM PIDANA (PK IV)

Pembimbing :

Prof. Dr. Aria Zurnetti, S.H., M.Hum
Dr. Nani Mulyati, S.H., MCL

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG

2026

No.Reg : 39/PK-IV/III/2026

ABSTRAK

PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA TAWURAN OLEH ANAK PADA TINGKAT PENYIDIKAN DI WILAYAH HUKUM POLSEK PAUH KOTA PADANG

(Muhammad Ikhsan, 2010113086, Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas
Andalas, 93 halaman, 2026)

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara untuk menciptakan perlindungan hak seluruh pihak termasuk anak sebagai subjek hukum. Kepolisian memiliki peran pada penegakan hukum di Indonesia sebagai penegak hukum pada tingkat penyidikan. Pergaulan anak saat ini berkembang dengan pesat, sehingga membuat orang tua khawatir karena banyaknya anak yang terjerumus pada tindak kejahatan. Salah satu bentuk perilaku yang sering terjadi adalah tawuran oleh anak yang mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat di Kecamatan Pauh Kota Padang yang sejak beberapa tahun terakhir. Fenomena tawuran ini menjadi salah satu prioritas utama yang harus cepat diselesaikan dan menjadi beban pemerintah serta masyarakat, khususnya pemerhati Pendidikan. Berdasarkan uraian di atas maka rumusan masalah yang dibahas adalah: 1. Bagaimanakah penegakan hukum tindak pidana tawuran oleh anak pada tingkat penyidikan di wilayah hukum Polsek Pauh Kota Padang 2. Bagaimanakah kendala penegakan hukum tindak pidana tawuran oleh anak pada tingkat penyidikan di wilayah hukum Polsek Pauh Kota Padang dan 3. Apakah upaya yang dilakukan oleh penegak hukum dalam mengatasi kendala penegakan hukum tindak pidana tawuran oleh anak pada tingkat penyidikan di wilayah hukum Polsek pauh Kota Padang. Penelitian ini menggunakan Metode Yuridis Empiris yang bersifat deskriptif analitis. Hasil penelitian ini adalah: 1. Penegakan hukum pada tingkat penyidikan dilaksanakan sesuai dengan KUHAP dan Undang-Undang SPPA (Sistem Peradilan Pidana Anak) meskipun dalam praktiknya masih ditemui kendala. 2. Dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kendala dalam penegakan Hukum di wilayah hukum polsek Pauh Kota Padang yang dipengaruhi oleh faktor hukum, penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta kebudayaan. Kendala tersebut meliputi keterbatasan pengaturan hukum yang mengatur tawuran secara khusus dan kewajiban diversi, kurangnya kompetensi penyidik dalam penanganan perkara anak, minimnya fasilitas pendukung, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta budaya permisif dan solidaritas kelompok remaja. 3. Upaya penegak hukum dalam mengatasi kendala penyidikan tindak pidana tawuran oleh anak di wilayah hukum Polsek Pauh Kota Padang adalah melalui optimalisasi penerapan Undang-Undang SPPA, meningkatkan kualitas dan kapasitas penyidik, khususnya dalam penanganan perkara anak. Selain itu penyesuaian sarana penyidikan, pengalihan penahanan anak ke unit Polsek yang memiliki fasilitas khusus, serta patroli rutin, Operasi Cipta Kondisi, program Jumat Curhat untuk meningkatkan kesadaran hukum dan partisipasi masyarakat.

Kata Kunci: Penegakan hukum, penyidikan, kepolisian, tawuran, anak